

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DALAM MEMBENTUK JARINGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

RAKHA NADHIFA AMARA

Kehadiran masyarakat dalam proses demokrasi atau pemilu amat dibutuhkan mengingat Bawaslu selaku lembaga pengawas tidak akan bisa menjalankan tugasnya secara optimal apabila hanya berjalan sendirian. Atas dasar hal tersebut Bawaslu menginisiasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) untuk mempersiapkan kader atau pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat. Dengan harapan mereka mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas-komunitas masyarakat. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi dari Program SKPP dalam membentuk jaringan sosial baru melalui proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tipe linier. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terlihat adanya peningkatan pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan keterampilan dalam pengawasan yang didapat oleh para Kader SKPP. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sendiri dipahami sebagai sebuah program dari Bawaslu yang sifatnya sukarela. Namun dalam realitanya definisi sukarela tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada para kader SKPP. Tidak adanya dana khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan RTL menjadi penyebab utama para Alumni Kader SKPP belum bisa secara maksimal memperluas jaringan pengawasan kepada masyarakat lain. Dalam kacamata teori jaringan sosial, belum terciptanya ikatan emosional yang kuat antara Bawaslu dengan para Alumni Kader SKPP dapat dikatakan sebagai penyebab dari belum maksimalnya implementasi Program SKPP dalam membentuk jaringan sosial pada masyarakat.

Kata kunci: Program SKPP, Bawaslu Provinsi Lampung, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF A SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF IN FORMING SOCIAL NETWORKS WITHIN THE COMMUNITY (CASE STUDY ON THE LAMPUNG PROVINCE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BOARD)

By

RAKHA NADHIFA AMARA

The presence of the community in the democratic or electoral process is very much needed considering that Bawaslu as a supervisory institution will not be able to carry out its duties optimally if it only runs alone. On this basis, Bawaslu initiated Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Programme to prepare cadres or pioneers of participatory supervision in the community. With the hope that they will be able to duplicate this participatory supervision system in communities. This makes researchers interested in seeing how the implementation of the SKPP Programme in forming new social networks through the process of transferring knowledge and skills. This research uses a descriptive qualitative method with a linear type case study approach. Meanwhile, interviews and documentation technique is used as Data collection techniques.

The results of the research indicated that there was an increase in basic electoral knowledge and supervisory skills gained by the SKPP Cadres. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) itself is understood as a voluntary programme from Bawaslu. However, in reality, the definition of voluntary is not well conveyed to SKPP cadres. The absence of special funds allocated for the implementation of RTL is the main cause of SKPP Alumni Cadres not being able to maximally expand the supervisory network to other communities. From the perspective of social network theory, the lack of a strong emotional bond between Bawaslu and the SKPP Cadres can be said to be the cause of the lack of maximum implementation of the SKPP Programme in forming social networks in the community.

Keywords: SKPP Program, Bawaslu Lampung Province, Participatory Supervision